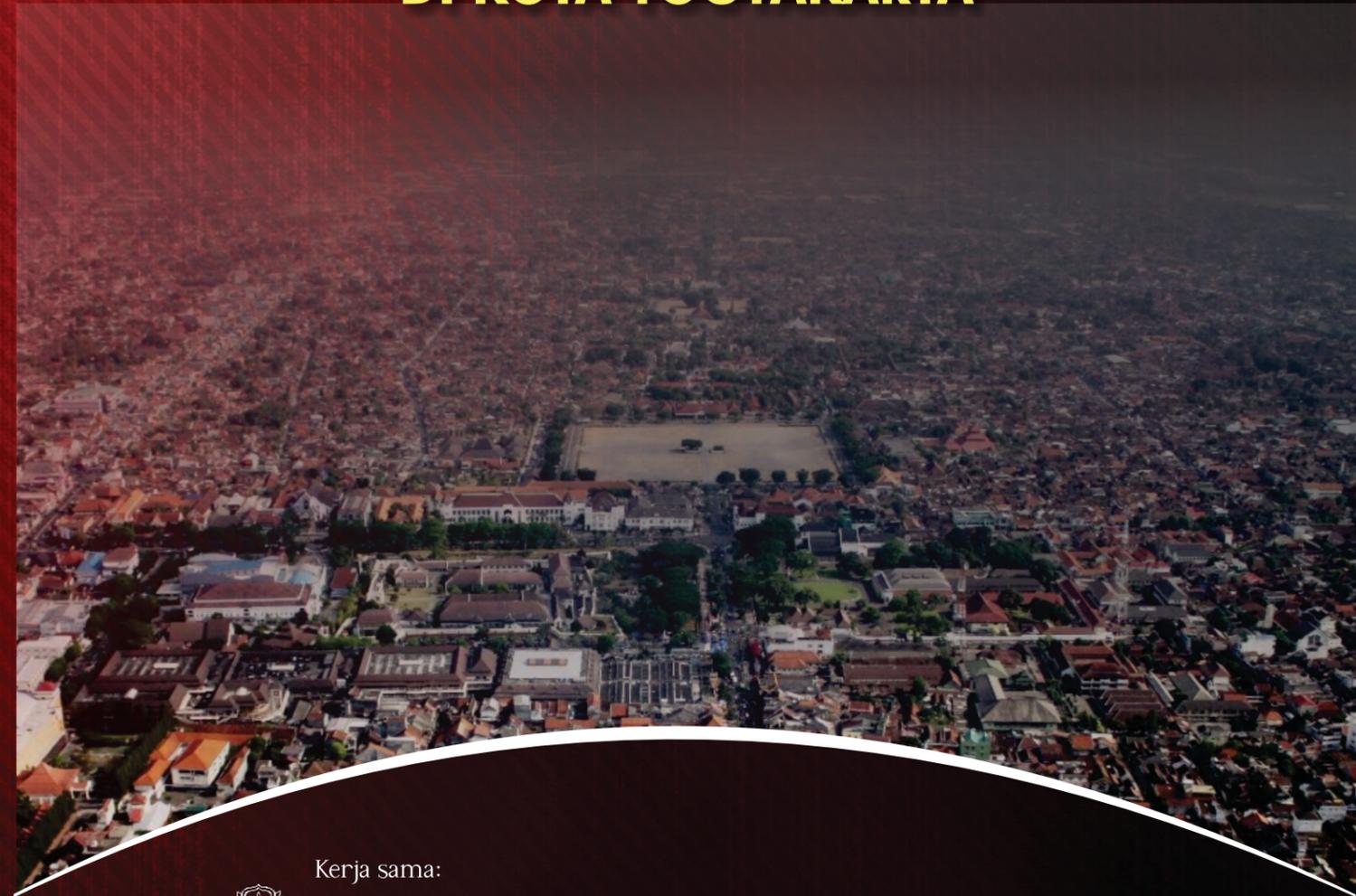


**SERI PENELITIAN TEMATIK 2018**

---

**PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA  
PEDULI KELUARGA SEJAHTERA  
DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU)  
DALAM PROGRAM KKBPK  
DI KOTA YOGYAKARTA**



Kerja sama:

UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PUSAT STUDI KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN

dengan



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2019



## **Kata Pengantar**

Laporan penelitian tentang peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kota Yogyakarta pada dasarnya merupakan bentuk apresiasi yang sangat tinggi atas kiprah dan peran yang dijalankan oleh mereka dalam rangka mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang ada di Kota Yogyakarta. Peran tersebut pada dasarnya menjadi domain utama dari pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan program KKBPK membutuhkan pelibatan banyak pihak dalam rangka mensukseskan program tersebut.

Peran tokoh agama sebagai elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat dirasa perlu untuk dilibatkan dalam rangka mengatasi permasalahan kependudukan. Tokoh agama baik secara mekanis dan kultural memiliki kedudukan yang cukup strategis di masyarakat. Banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam permasalahan social, budaya, keagamaan, bahkan politik membutuhkan pendapat dan arahan dari para tokoh agama. Peran strategis tersebut seyogyanya bisa juga dimanfaatkan dalam rangka mensukseskan program-program yang dilakukan oleh pemerintah, yang salah satunya adalah program KKBPK.



Atas dasar tersebut, pemerintah berinisiatif mewadahi berupa forum yang berisikan para tokoh agama untuk bersama-sama melakukan fungsi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), serta advokasi dan rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam program KB. Wadah tersebut dinamai dengan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU).

Terima kasih kepada BKKBN DIY yang telah memberikan kesempatan kepada PSKK UGM untuk melakukan kajian ini. Terima kasih kepada Fapsedu Kota Yogyakarta dan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Yogyakarta yang telah bersedia memberikan informasi sehingga bisa memberikan gambaran bagi tim untuk melakukan kajian ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terbuka kesempatan untuk memberikan masukan demi kesempurnaan laporan ini.

Yogyakarta, Desember 2018

Kepala PSKK UGM

Dr. soc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
BAB II SEKILAS KONDISI KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA YOGYAKARTA.....	5
2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	5
2.2 Kualitas Penduduk.....	13
2.3 Pengaturan Fertilitas .....	15
2.4 Keluarga Berencana dan Unmet Need.....	19
2.5 Indeks Gini.....	23
2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	26
2.7 Pembangunan Keluarga .....	27
BAB III PERAN PEMUKA AGAMA DALAM PROGRAM KKBPK .....	31
BAB IV KIPRAH FAPSEDU KOTA YOGYAKARTA DALAM PROGRAM KKBPK37	
4.1 Visi, Misi, dan Tujuan Fapsedu Kota Yogyakarta.....	37
4.2 Sasaran Program Fapsedu Kota Yogyakarta.....	39
4.3 Capaian Kinerja Fapsedu Kota Yogyakarta .....	43
4.4 Aspek Kelembagaan Dan Pola Koordinasi Fapsedu Kota Yogyakarta.....	46



BAB V OPTIMALISASI PERAN FAPSEDU KOTA YOGYAKARTA DALAM PROGRAM KKBPK.....	49
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	51
6.1 Kesimpulan.....	51
6.2 Rekomendasi .....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53



## BAB 1

# PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Dalam mewujudkan keinginan tersebut maka keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang mengedepankan kualitas penduduk akan menjadikan masyarakat Indonesia lebih unggul di masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang yang menjadikan penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas penduduk dalam pembangunan.

Peningkatan kapasitas penduduk dimulai dari terciptanya pembangunan keluarga yang sejahtera. Untuk itu perencanaan keluarga yang baik mutlak diperlukan. Secara umum perencanaan keluarga yang baik dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Program ini bertujuan untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ukuran dikatakan sebagai keluarga berkualitas selalu dikaitkan dengan berbagai indikator pengelolaan keluarga, dan salah satu indikator pentingnya adalah rata-rata jumlah anak dalam sebuah keluarga tersebut.

Proses terciptanya keluarga yang berkualitas merupakan proses jangka panjang yang tidak dapat diraih secara instan. Untuk itu kampanye dan penyadaran masyarakat akan pentingnya hal tersebut harus sejak dini dilakukan. Pemerintah selaku *leading sector* dalam upaya mewujudkan hal



tersebut perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, tidak terkecuali dukungan dari para tokoh dan pemuka agama.

Pelibatan para tokoh agama sangatlah penting terutama dalam melakukan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Tokoh agama sangat membantu dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan berketahanan. Akar keagamaan dan tradisi kekeluargaan yang dimiliki masyarakat telah melemah dan pondasi keluarga yang rapuh berdampak pada system ketahanan keluarga yang mudah goyah. Kondisi ini akan berdampak pada ancaman aspek kehidupan yang mencakup aspek social, ekonomi dan masalah besar lain yang sulit dihadapi.

Tatangan berat persoalan kependudukan di Kota Yogyakarta adalah pengendalian kuantitas penduduk dengan mempertahankan angka fertilitas yang rendah serta peningkatan kesejahteraan penduduk baik dari dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Mempertahankan angka kelahiran yang rendah yaitu 9 orang per 1000 penduduk dengan menekan angka unmet need 11 persen pada tahun 2016, meminimalkan atau menghilangkan angka perkawinan di bawah 18 tahun, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk merupakan persoalan kependudukan yang harus segera diselesaikan.

Menyampaikan kebaikan pada dasarnya merupakan kewajiban dari para tokoh agama untuk disampaikan kepada umatnya. Untuk itu, program-program pemerintah yang bertujuan untuk terciptanya manusia yang berkualitas menjadi beririsan dengan tugas tokoh agama. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan penyelesaian dalam upaya menciptakan manusia yang berkualitas, seperti masalah kependudukan, keluarga berencana dan masalah kesejahteraan keluarga tentunya harus segera dilakukan oleh pemerintah atas dukungan dari para tokoh agama.

Pelibatan tokoh agama dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut oleh pemerintah diwadahi dalam sebuah bentuk organisasi yang diberi nama Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU). Forum ini memiliki tugas utama melakukan kampanye kepada masyarakat dengan bahasa agama mengenai tiga permasalahan tersebut. Penggunaan bahasa agama dalam penyelesaian permasalahan tersebut akan



lebih mudah diterima oleh masyarakat. Upaya tersebut telah membuahkan beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Fapsedu Kota Yogyakarta telah menunjukkan kesuksesan dalam membantu program KKBPK dan mengembangkan jaring relasi hingga tingkat yang lebih rendah. Saluran informasi dari provinsi hingga ke sasaran program yaitu masyarakat terdelivery dengan bagus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fapsedu Kota Yogyakarta diangkat sebagai sebuah tulisan sebagai masukan bagi Fapsedu lain di Yogyakarta untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kerja sebagai mitra BKKBN untuk menghasilkan kebijakan kependudukan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pembahasan ini terbagi dalam dua segmen yaitu pertama kontribusi yang sudah dilakukan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta dalam mensukseskan program KKBPK. Kedua, cara yang dilakukan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta dalam mensukseskan program KKBPK. Untuk itu tulisan ini untuk mengetahui apa dan bagaimana peran dalam bentuk praktik-praktik baik apa saja yang sudah dilakukan oleh Fapsedu dalam menjalankan fungsi KIE.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada para pihak yang mengetahui dan terlibat langsung pada kegiatan Fapsedu di Kota Yogyakarta. Kepala Fapsedu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, camat, dan warga masyarakat. Selain itu juga dilakukan analisis dokumen yang tersedia di Fapsedu maupun kader yang mengetahui tentang kegiatan Fapsedu. Analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif dengan menjelaskan secara detail dan runtut atas temuan data yang muncul.





## **BAB II**

# **SEKILAS KONDISI KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA YOGYAKARTA**

### **2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk**

Kondisi Kependudukan Kota Yogyakarta dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, menggambarkan bahwa pada periode waktu 2014-2015 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan hingga mencapai -9,82. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini sangat besar, dan apabila dibiarkan tidak mustahil, Kota Yogyakarta akan mengalami kekurangan penduduk. Disinilah pemerintah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan KB berperan penting mengatur atau mengendalikan jumlah penduduk, ditambah atau dikurangi.

Banyak pandangan yang mengartikan laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kelangsungan hidup penduduk selanjutnya. Jumlah penduduk yang terlalu banyak akan berdampak pada penurunan tingkat kenyamanan untuk tinggal di suatu wilayah. Di sisi lain, penurunan jumlah penduduk yang terlalu besar pun juga dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk pada suatu wilayah sehingga akan mengganggu roda ekonomi makro.

Rendahnya laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta apakah sebuah prestasi atau sebagai keberhasilan kebijakan menekan tingkat kelahiran. Atau



sebagai indikator pamor Kota Yogyakarta yang memudar sehingga jumlah migran masuk berkurang? Atau data dasar perhitungan laju pertumbuhan penduduk yang kurang tepat. Kondisi ini cukup ironis karena faktanya hampir setiap ruas jalan di Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Banyak ungkapan yang dilontarkan bahwa Yogyakarta sudah tidak “Berhati Nyaman”. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi perbedaan antara data dengan kondisi lapangan atau dengan kata lain data menunjukkan laju pertumbuhan penduduk kota negatif yang artinya terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya, sementara itu dari sisi tingkat kepadatan jalan dirasakan terjadi peningkatan jumlah penduduk.

**Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2014-2017**

Jenis Data	Tahun		
	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Laju Pertumbuhan Penduduk	-9.82	0.86	-0.34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018

Laju pertumbuhan mulai meningkat pada tahun 2015-2016 bahkan mencapai nilai positif pada angka 0,86. Dinamika proses demografi di Kota Yogyakarta cukup kuat yang ditunjukkan oleh penurunan laju pertumbuhan penduduk pada periode waktu 2016-2017 yang menyentuh angka -0,34. Peningkatan jumlah penduduk selalu disebabkan karena fertilitas, mortalitas dan migrasi. Pertumbuhan penduduk positif manakala angka fertilitas dan migrasi masuk lebih tinggi dibandingkan dengan angka mortalitas dan migrasi keluar. Pertanyaannya adalah apakah laju pertumbuhan penduduk positif atau negatif yang tepat di Kota Yogyakarta.

Jumlah penduduk dalam suatu wilayah akan berpengaruh terhadap banyak hal mulai dari social, politik, bahkan ekonomi. Jumlah penduduk suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan keberadaan suatu layanan publik.



Berdasarkan tabel berikut ini dapat digambarkan bahwa terdapat kecamatan yang mendominasi jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Sebanyak 21 persen penduduk Kota Yogyakarta berada di Kecamatan Umbulharjo. Terdapat dua kecamatan lain dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Tegalrejo. Ketiga kecamatan tersebut dalam tahun 2017 mengalami penurunan jumlah penduduk atau dengan kata lain dibandingkan dengan tahun sebelumnya memiliki laju pertumbuhan penduduk negatif. Sementara itu, wilayah kecamatan yang lain mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2017.

**Tabel 2. 2 Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta menurut Kecamatan Tahun 2016 dan 2017**

Kecamatan	2016		2017	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Tegalrejo	37,757	9.04	36,853	8.97
Jetis	23,911	5.72	27,235	6.63
Gondokusuman	47,160	11.29	42,042	10.23
Danurejan	19,019	4.55	21,121	5.14
Gedongtengen	18,216	4.36	20,210	4.92
Ngampilan	16,932	4.05	18,561	4.52
Wirobrajan	25,831	6.18	27,746	6.75
Mantrijeron	33,103	7.92	35,207	8.57
Kraton	17,564	4.20	21,939	5.34
Gondomanan	13,603	3.26	15,010	3.65
Pakualaman	9,341	2.24	10,716	2.61
Mergangsan	30,475	7.30	31,986	7.78
Umbulharjo	88,667	21.23	68,760	16.73
Kotagede	36,165	8.66	33,535	8.16
<b>Kota Yogyakarta</b>	<b>417,744</b>	<b>100</b>	<b>410,921</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS (Kota Yogyakarta dalam Angka), 2017

Persebaran jumlah penduduk di Kota Yogyakarta juga dipengaruhi oleh luas wilayah di masing-masing kecamatan. Kecamatan Umbulharjo memiliki jumlah penduduk tertinggi karena memiliki luas wilayah lebih besar di bandingkan dengan kecamatan lain. Luas wilayah Kecamatan Umbulharjo adalah 25 persen dari luas Kota Yogyakarta yang memiliki luas 32,50 Km<sup>2</sup>



(BPS, 2017). Luas wilayah yang lebih besar mampu menampung jumlah penduduk yang lebih besar. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan lahan Kecamatan Umbulharjo yang 63,88 persen dimanfaatkan untuk perumahan. Tidak berbeda dengan Kecamatan Pakualaman memiliki jumlah penduduk paling rendah karena luas wilayah yang dimiliki hanya mencapai 1,94 persen dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

Penduduk menurut umur dapat diklasifikasikan tiga aspek yaitu penduduk belum produktif (berumur kurang dari 15 tahun), penduduk sudah tidak produktif (berumur lebih dari 60 tahun) dan penduduk produktif atau berumur antara 15-60 tahun. Perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif dan penduduk usia produktif disebut dengan beban ketergantungan atau *dependency ratio (DR)*. Angka beban ketergantungan mendekati 0 berarti jumlah penduduk usia tidak produktif lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Sebaliknya ketika angka beban ketergantungan mendekati angka 100 berarti jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif memiliki jumlah yang sama. Ketika angka beban ketergantungan lebih besar dari 100 berarti jumlah penduduk tidak produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia produktif.

Ratio ketergantungan ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Apabila jumlah penduduk kelompok umur produktif memiliki beban tanggungan yang semakin rendah maka produktifitas penduduk diharapkan meningkat. Kondisi dimana jumlah penduduk kelompok umur produktif lebih banyak dari pada kelompok umur belum atau tidak produktif dikenal dengan istilah Bonus Demografi. Ketika jumlah penduduk umur produktif semakin tinggi maka beban tanggungan terhadap penduduk umur belum atau tidak produktif semakin rendah sehingga pengeluaran dari pendapatan kelompok usia produktif untuk menanggung kelompok usia belum atau tidak produktif akan berkurang. Dengan kata lain pendapatan yang dimiliki dapat digunakan untuk investasi maupun peningkatan kesejahteraan keluarga.



Ratio ketergantungan Kota Yogyakarta dibandingkan dengan tahun 2015 menunjukkan penurunan, artinya jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif mengalami penurunan. Dalam Bahasa ekonomi, Kota Yogyakarta memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang baik. Tahun 2017 sebesar 40,53 persen, artinya, 100 jiwa penduduk usia produktif di Kota Yogyakarta memiliki beban penduduk belum atau tidak produktif sekitar 41 jiwa. Ratio ketergantungan pada tahun 2017 ini lebih rendah.

Perbedaan angka beban ketergantungan antar kecamatan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Kecamatan Gondokusuman memiliki beban ketergantungan sebesar 38,73 persen dan yang tertinggi berada di Kecamatan Wirobrajan sebesar 42,29 persen. Meskipun demikian angka beban ketergantungan di Kecamatan Wirobrajan pun masih di bawah angka 50 artinya jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang non produktif atau dapat pula diartikan semua kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki potensi yang sama dalam pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.3 Ratio Ketergantungan Tahun 2015-2017**

Kecamatan	Ratio Ketergantungan		
	2015	2016	2017
Tegalrejo	41.51	40.91	40.92
Jetis	40.29	39.83	40.51
Gondokusuman	38.89	38.94	38.73
Danurejan	40.49	39.62	40.04
Gedongtengen	40.10	39.37	39.64
Ngampilan	40.38	40.23	40.40
Wirobrajan	42.96	42.25	42.29
Mantrijeron	40.90	40.68	40.79
Kraton	40.24	39.56	39.36
Gondomanan	39.96	39.63	39.58
Pakualaman	40.71	40.72	40.30
Mergangsan	40.90	40.32	40.74
Umbulharjo	40.95	40.89	41.25
Kotagede	41.19	40.84	41.20
<b>Kota Yogyakarta</b>	<b>40.71</b>	<b>40.35</b>	<b>40.53</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018



Ratio ketergantungan Kota Yogyakarta dalam rentang tahun 2015-2017 mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan atau dapat diartikan bahwa ratio ketergantungan Kota Yogyakarta cenderung Konstan. Tahun 2015 ratio ketergantungan Kota Yogyakarta Sebesar 40,71%. Tahun 2016 ratio ketergantungan mengalami perubahan menjadi 40,35%. Ratio Ketergantungan Kota Yogyakarta pada tahun 2017 berubah menjadi 40,53%. Ratio Ketergantungan yang cenderung konstan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah penduduk umur produktif Kota Yogyakarta masih lebih besar dari umur tidak atau belum produktif.

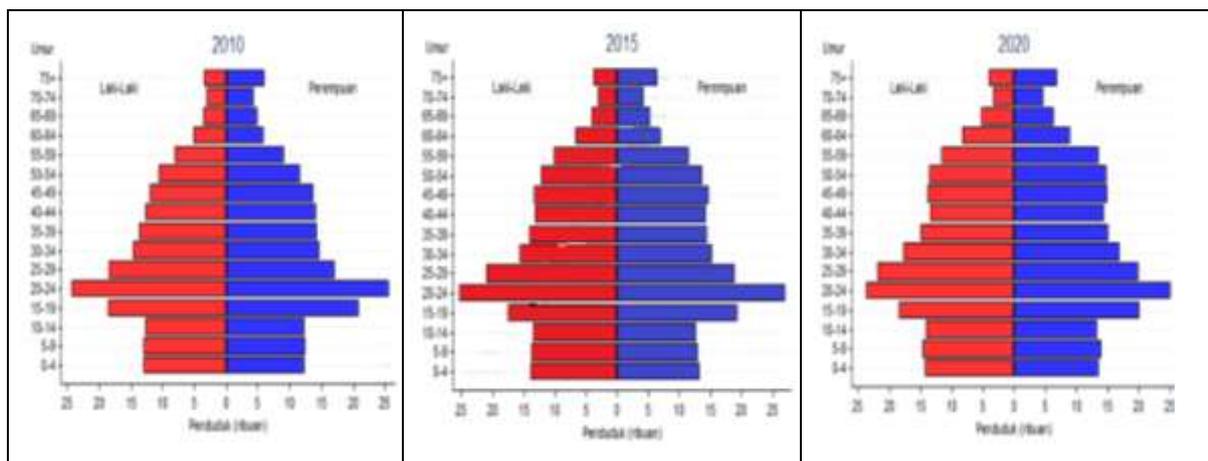
Selama kurun waktu tiga tahun terakhir kecamatan yang memiliki Ratio Ketergantungan terendah adalah Kecamatan Gondokusuman. Kecamatan Gondokusuman memiliki jumlah penduduk umur produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk umur belum atau tidak produktif dari seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut menjadi faktor yang menyebabkan ratio ketergantungan Kecamatan Gondokusuman menjadi yang paling rendah. Dilihat dari data tiga tahun terakhir, persentase ratio ketergantungan penduduk Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap tingkat ketergantungan penduduk terhadap kelompok umur produktif di masing-masing kecamatan. Perubahan ratio ketergantungan yang cenderung konstan ini diperkirakan tidak akan mengalami banyak perubahan di tahun-tahun berikutnya. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun kedepan ratio ketergantungan Kota Yogyakarta diprediksi masih berada dibawah 50% dan Kota Yogyakarta masih memiliki jumlah penduduk pada kelompok umur produktif yang lebih banyak dibandingkan penduduk umur belum atau tidak produktif. Ratio Ketergantungan dibawah 50% dinilai ideal untuk memprediksi bahwa tingkat kesejahteraan penduduk lima tahun kedepan masih baik dan Kota Yogyakarta masih memiliki peluang menerima bonus demografi.

Secara umum penduduk Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Jumlah ini tidak



berbeda dengan kondisi penduduk Indonesia yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan jumlah penduduk dalam rentang waktu tiga tahun terakhir masih didominasi oleh penduduk perempuan. Tahun 2015 persentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 48,81% dan persentase jumlah penduduk perempuan sebesar 51,19% dari seluruh jumlah penduduk kota Yogyakarta sejumlah 408.823 jiwa. Tahun 2016 jumlah penduduk kota Yogyakarta sejumlah 412.331 dengan persentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 48,78% dan jumlah penduduk perempuan sebesar 51,22%. Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 48,77% dan persentase jumlah penduduk perempuan sebesar 51,23% dari 410.921 jumlah penduduk tahun 2017. Berdasarkan data tersebut maka tren proporsi jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan diprediksi tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dan masih akan terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta menurut kelompok umur dan jenis kelamin oleh BPS telah diproyeksikan ke dalam bentuk piramida sejak tahun tahun 2010 hingga 2020. Berdasarkan piramida tahun 2010, 2015, hingga 2020 diketahui apabila Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan struktur kependudukan yang signifikan. Hal tersebut dapat di lihat dari piramida penduduk dalam kurun waktu 5 tahunan tidak mengalami perubahan bentuk piramida. Hingga saat ini bentuk piramida penduduk kota Yogyakarta termasuk dalam piramida konstruktif.



**Gambar 2. 1 Piramida Penduduk 2010-2020**

Sumber: BPS, 2015

Piramida penduduk kota Yogyakarta memiliki tren yang sama tiap tahun. Meskipun jumlah penduduk Kota Yogyakarta terus meningkat, namun dalam komposisi tidak mengalami banyak perubahan. Bentuk piramida konstruktif diidentifikasi dari lebar bawah piramida yang merupakan kelompok umur 0-4 tahun yang tidak terlalu lebar. Hal tersebut dapat diartikan tingkat kelahiran Kota Yogyakarta tidak terlalu tinggi. Puncak piramida yang merupakan kelompok umur 75 tahun keatas melebar dari batas kelompok umur tidak produktif sejak umur 65 tahun. Puncak yang melebar menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kota Yogyakarta cukup tinggi. Hal tersebut sesuai dengan data BPS yang menunjukkan IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2017 adalah 85,49. Angka ini lebih tinggi dari Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 78,89. Bentuk piramida konstruktif memiliki penduduk dengan umur dewasa yang cukup tinggi hal ini sesuai dengan bentuk piramida Kota Yogyakarta yang didominasi oleh penduduk umur produktif terutama kelompok umur 20-24 tahun. Penduduk yang memiliki bentuk piramida konstruktif memiliki potensi mengalami penurunan jumlah penduduk karena tingkat kelahirannya tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu perlu adanya upaya pengendalian penduduk agar tidak mengalami defisit penduduk.



## **2.2 Kualitas Penduduk**

Kota Yogyakarta yang dikenal dengan istilah “kota pelajar”. Julukan Kota Pelajar menjadikan tingkat pendidikan sebagai salah satu kriteria untuk menunjukkan bagaimana komposisi penduduk Kota Yogyakarta. Sejak tahun 2015 hingga 2017 jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di kota Yogyakarta persentasenya terus meningkat. Tahun 2015 persentase penduduk yang bersekolah di Kota Yogyakarta sebesar 83,80% dari seluruh jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Persentase penduduk yang bersekolah di Kota Yogyakarta kemudian meningkat sebesar 3% pada tahun 2016 menjadi 86,80% dan di tahun 2017 menjadi 86,95%. Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah mengalami penurunan dari tahun 2015 -2017. Tahun 2015 persentase penduduk yang belum atau tidak sekolah sebesar 16,20%. Persentase penduduk yang belum atau tidak sekolah kemudian menurun di tahun 2016 menjadi 13,20% dan tahun 2017 menjadi 13,05% dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta.

Jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di Kota Yogyakarta dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan di masing-masing kecamatan. Penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2017 didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat. Tahun 2015 persentase jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebesar 34,71% Tahun 2016 meningkat menjadi 34,85% dan Tahun 2017 bertambah menjadi 34,97% dari jumlah penduduk yang bersekolah. Kenaikan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan juga terjadi pada tingkat pendidikan perguruan tinggi baik dari D3 hingga S3. Persentase jumlah penduduk tahun 2015 dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi meningkat dari 24, 85% menjadi 25,47% di tahun 2016 dan terus meningkat di tahun 2017 menjadi 25,73%.

Berbanding terbalik dengan persentase jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi, untuk tingkat pendidikan SD dan SMP/ sederajat persentase dengan tingkat pendidikan ini



terus menurun pada tiga tahun terakhir. Persentase tingkat pendidikan SD dan SMP/ sederajat yang terus menurun dapat disebabkan adanya keberhasilan sistem kejar paket, dimana penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah mulai mengikuti program kejar paket A/B/C sehingga tingkat pendidikan penduduk Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya paling rendah adalah SMP/ sederajat dengan persentase 15,69% di tahun 2015, dan terus menurun menjadi 14,70% di tahun 2016 dan ditahun 2017 menjadi 14,69% dari jumlah penduduk yang bersekolah. Apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk umur produktif yang terus bertambah, dalam lima tahun kedepan penduduk Kota Yogyakarta berpotensi memiliki banyak penduduk umur produktif dengan tingkat pendidikan yang baik. Kondisi ini juga mencerminkan apabila Program Sekolah 12 Tahun terlaksana dengan baik di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2. 4 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2017**

Kecamatan	SD			SLTP/ Sederajat			SMA/ Sederajat			PT		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Tegalrejo	26.95	27.17	26.82	17.10	16.15	16.30	33.87	34.07	34.02	22.08	22.61	22.86
Jetis	26.75	26.34	25.87	15.96	15.11	15.03	37.71	38.05	38.23	19.58	20.50	20.87
Gondokusuman	22.50	22.35	21.84	14.22	13.41	13.63	33.40	33.85	34.01	29.89	30.39	30.52
Danurejan	23.40	23.26	23.21	16.44	15.56	15.26	37.79	38.50	38.97	22.37	22.68	22.57
Gedongtengen	26.98	27.29	27.51	18.87	17.97	17.89	36.40	36.70	36.70	17.75	18.04	17.90
Ngampilan	23.82	24.11	23.81	17.26	16.10	15.89	36.90	36.94	36.91	22.02	22.85	23.40
Wirobrajan	25.22	26.00	25.81	16.39	15.16	15.25	33.48	33.62	33.79	24.91	25.22	25.16
Mantrijeron	23.45	23.99	23.65	15.41	14.21	14.17	35.27	35.12	35.31	25.87	26.68	26.87
Kraton	19.74	20.71	20.46	13.31	12.98	13.11	38.03	37.02	36.94	28.93	29.29	29.49
Gondomanan	23.78	24.80	24.39	18.19	16.50	16.59	36.22	36.39	36.74	21.81	22.31	22.28
Pakualaman	22.05	21.84	20.89	15.31	14.46	14.49	37.32	37.75	38.45	25.31	25.95	26.17
Mergangsan	22.85	23.53	23.39	15.45	14.51	14.46	34.54	34.61	34.58	27.16	27.34	27.57
Umbulharjo	26.25	25.92	25.27	14.62	13.61	13.49	31.77	31.99	32.11	27.36	28.48	29.13
Kotagede	28.18	28.63	28.22	15.19	14.00	13.95	33.13	33.22	33.34	23.50	24.14	24.50
Kota Yogyakarta	24.75	24.98	24.61	15.69	14.70	14.69	34.71	34.85	34.97	24.85	25.47	25.73

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018



Berdasarkan persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Yogyakarta, dalam tiga tahun terakhir Kecamatan dengan persentase penduduk pada tingkat pendidikan SD tertinggi adalah Kecamatan Kotagede. Meskipun dari tahun 2015-2017 persentasenya selalu berubah, namun bila dibandingkan dengan kecamatan lainn masih tetap tertinggi dengan rata-rata persentasenya di tiga tahun terakhir adalah 28,34%. Kecamatan dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat tertinggi dari 2015-2017 berada di kecamatan Gedongtengen. Persentase jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMP/ Sederajat di Kecamatan Gedongtengen mencapai 18,87% di tahun 2015 dan menurun menjadi 17,97% di tahun 2016 dan 17,89% di tahun 2017. Namun, meski persentase jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat di kecamatan Gedongtengen tertinggi tiap tahun persentase jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat terus mengalami penurunan hingga tahun 2017. Persentase jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat pada tahun 2015 adalah kecamatan Kraton sebesar 38,03%. Tahun 2016 kecamatan dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat tertinggi menjadi Kecamatan Danurejan hingga tahun 2017. Kecamatan Kraton terus mengalami penurunan pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat dan mengalami peningkatan pada tingkat pendidikan perguruan tinggi. Kecamatan yang memiliki persentase jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi paling besar adalah Kecamatan Gondokusuman dengan persentase jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun 2015-2017.

### **2.3 Pengaturan Fertilitas**

Fertilitas atau kelahiran dalam demografi menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan penduduk. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar memberikan perhatian lebih terhadap tingginya angka kelahiran. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dianggap sebagai permasalahan yang dapat menghambat pembangunan. Pemerintah terus mengupayakan untuk menekan angka kelahiran di Indonesia dengan mencanangkan program keluarga berencana dengan



tagline “Dua Anak Lebih Baik”. Sejak dimulai upaya penurunan angka kelahiran tahun 1971 tingkat kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan. Sampai sekarang program ini masih terus berjalan berjalan dan mulai menunjukkan hasilnya.

Turunnya angka kelahiran dapat dilihat dari jumlah kelahiran yang terjadi di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2016 yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan jumlah kelahiran pertahun maka dapat pula ditentukan angka kelahiran kasar atau *Crude Birth Rate* (CBR) Kota Yogyakarta tiap tahun. Angka Kelahiran kasar digunakan untuk menentukan jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun.

**Tabel 2. 5 Jumlah Kelahiran dan CBR Kota Yogyakarta Tahun 2016-2017**

Tahun	Jumlah kelahiran	CBR
2012	4.774	11.16
2013	4.658	11.45
2014	4.369	10.55
2015	3.972	9.70
2016	3.841	9.54

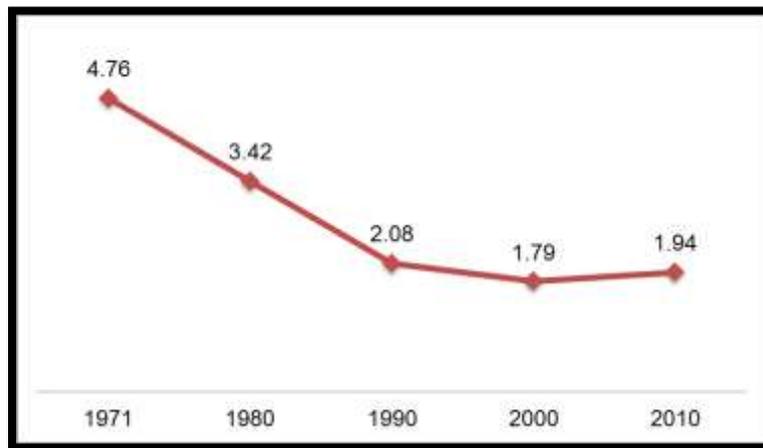
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Tahun 2017

Berdasarkan data jumlah kelahiran, Kota Yogyakarta memiliki CBR yang terus menurun sejak tahun 2012-2016. Penurunan CBR menunjukkan bahwa di wilayah Kota Yogyakarta jumlah kelahiran terus berkurang. Hal ini menunjukkan upaya pengendalian penduduk berdasarkan jumlah kelahiran mengalami keberhasilan. Tahun 2012 CBR Kota Yogyakarta mencapai angka 11,16. Angka ini terus menurun hingga pada tahun 2016 dengan angka CBR hanya mencapai 9,54. Berdasarkan angka tersebut, CBR di kota Yogyakarta tergolong rendah. Artinya, jumlah kelahiran di Kota Yogyakarta terus mengalami menurun.



Angka kelahiran kasar yang didapatkan tersebut perlu adanya interpretasi yang lebih mendalam. Hal ini dikarenakan data yang dapat digunakan untuk menentukan CBR Kota Yogyakarta saat ini merupakan data yang didapatkan dari jumlah kelahiran yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta tanpa membedakan status kependudukan dari setiap jiwa yang melahirkan. Artinya, kelahiran yang tercatat belum tentu merupakan penduduk Kota Yogyakarta. Kondisi yang perlu di perhatikan disebabkan karena jumlah kelahiran yang tercatat tidak membedakan antara penduduk kota Yogyakarta dengan penduduk yang hanya menumpang lahir di Kota Yogyakarta. Untuk mendapatkan angka CBR yang lebih akurat perlu adanya penataan pendataan jumlah kelahiran sesuai dengan kependudukan agar di dapatkan data jumlah kelahiran penduduk asli Kota Yogyakarta sehingga pengaturan fertilitas penduduk lebih tepat.

Berdasarkan data sensus penduduk Tahun 1971-2010 angka kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) juga menunjukkan adanya tren penurunan sejak dimulai program keluarga berencana. Data BPS menunjukkan sejak tahun 1971 hingga 2010 TFR provinsi D.I.Yogyakarta terus mengalami penurunan. Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari provinsi D.I.Yogyakarta memiliki kecenderungan TFR yang tidak jauh berbeda. Sejak awal sensus penduduk tahun 1971 TFR D.I.Yogyakarta memiliki angka 4,76. Angka ini menurun menjadi 3,42 di Tahun 1980. Tahun 1990 TFR provinsi D.I.Yogyakarta menurun menjadi 2,08. Memasuki tahun 2000 angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,79. Data Sensus tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan TFR menjadi 1,94. Angka ini perlu menjadi perhatian karena berdasarkan indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang TFR tidak boleh melebihi 2,1. Oleh sebab itu, agar TFR terus dibawah standar maka perlu adanya upaya untuk terus mempertahankan TFR agar tidak melebihi angka 2,1.



**Gambar 2. 2 Grafik TFR D.I.Yogyakarta**

Sumber: BPS, Hasil Sensus Tahun 1971,1980,1990,2000,2010

Kondisi fertilitas di suatu wilayah dipengaruhi oleh banyak faktor salah satu faktor tersebut adalah umur kawin pertama (UKP). Umur kawin pertama memiliki hubungan yang negatif dengan fertilitas. Maksudnya, semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksi. Asumsi yang dihasilkan apabila masa reproduksi semakin banyak maka akan semakin banyak anak yang dilahirkan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi jumlah kelahiran yang terjadi sehingga dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Sesuai UU no 1 Tahun 1974 umur minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah saat laki-laki mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun. WHO juga menyebutkan bahwa umur dibawah 19 tahun masih tergolong remaja sehingga kejadian pernikahan dibawah umur identik dengan istilah pernikahan dini. Umur dibawah 19 tahun dirasa masih terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini di karenakan pada umur tersebut secara psikologis ataupun non psikologis masih di rasa belum dewasa.

Data BPS mencatat untuk pernikahan dibawah umur 19 tahun persentasenya cukup fluktuatif namun cenderung menurun. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang termasuk dalam wilayah yang memiliki persentase pernikahan



dini terendah apabila di bandingkan dengan Provinsi D.I.Yogyakarta maupun Indonesia. Persentase UKP sejak enam tahun terakhir pada umur dibawah 19 tahun yang terendah terjadi pada tahun 2015. UKP Tahun 2015 pada kelompok umur 17-18 Tahun sebesar 3,22% dan untuk dibawah 16 tahun hanya sebesar 0,89. Tahun 2013 persentase UKP pada kelompok umur 17-18 Tahun sebesar 15,33% dan pada umur 16 Tahun sebesar 5,64%.

Semakin rendah persentase UKP menunjukkan bahwa pendewasaan umur kawin di Kota Yogyakarta cukup berhasil. Meskipun persentasenya rendah namun perlu ada perhatian terhadap pernikahan pada umur dibawah 19 tahun. Hal ini dikarenakan pernikahan dini selain dapat meningkatkan angka kelahiran juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Umur yang dirasa belum matang atau dewasa dapat menimbulkan permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya yang akan berdampak pada kondisi penduduk Kota Yogyakarta.

Berdasarkan table persentase umur kawin pertama paling tinggi di lakukan pada umur 19-24 tahun. Sejak Tahun 2012-2016 persentase penduduk umur kawin pertama 19-24 tahun berkisar 50%. Berdasarkan studi PSKK UGM Tahun 2015 umur yang diinginkan remaja Kota Yogyakarta untuk menikah minimal adalah 21 Tahun dengan rata-rata umur yang diinginkan adalah pada umur 25 Tahun. Pertimbangan umur tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan psikologi. Usia perkawinan pertama perlu menjadi perhatian karena sebaiknya UKP tidak lebih dari 30 tahun. Hal ini terkait dengan masa kesuburan dan faktor lainnya yang dapat menimbulkan masalah seperti kematian bayi, resiko ibu meninggal dan sebagainya. Umur perkawinan ideal yang masih terus di kampanyekan oleh pemerintah dalam program keluarga berencana adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 Tahun untuk laki-laki.

## **2.4 Keluarga Berencana dan Unmet Need**

Pengendalian kelahiran selain dengan menurunkan persentase pernikahan dini juga dapat dilakukan dengan pengendalian kelahiran dengan



menggunakan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) atau lebih dikenal dengan akseptor KB. Pasangan usia subur merupakan pasangan suami isteri yang istrinya berumur 15-49 tahun. Pengendalian kelahiran pada PUS dilakukan untuk mengurangi resiko melahirkan terlalu muda (umur istri dibawah 20 tahun) dan melahirkan terlalu tua (umur istri di atas 35 tahun). Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi juga di harapkan mampu mengurangi jumlah kelahiran pada setiap ibu. Pasangan usia subur dalam kondisi normal akan sangat mudah memiliki anak sehingga untuk mengurangi jumlah penduduk pemerintah mencanangkan untuk tidak memiliki anak lebih dari tiga. Selain itu, demi kesehatan ibu dan anak penggunaan KB dilakukan untuk memberikan jarak kelahiran antar anak. Jarak melahirkan yang terlalu dekat antar anak akan mempengaruhi kesehatan bagi ibu dan anaknya. Tahun 2016 jumlah PUS di Kota Yogyakarta berjumlah 44.462 jiwa. Berdasarkan jumlah PUSnya, 73,55% merupakan PUS peserta KB aktif. Persentase PUS peserta KB ini cukup tinggi karena lebih dari 50% PUS Kota Yogyakarta sudah memahami pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur dan memberikan jarak kelahiran.

**Tabel 2.6 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Persentase PUS peserta KB Aktif 2016**

Kecamatan	Jumlah PUS	Persentase PUS peserta KB aktif (%)
Tegalrejo	4170	84.20
Jetis	2972	78.26
Gondokusuman	4021	79.51
Danurejan	2397	70.38
Gedongtengen	1900	78.74
Ngampilan	1892	80.87
Wirobrajan	3023	75.65
Mantrijeron	4211	63.17
Kraton	1984	60.03
Gondomanan	1368	61.92



Pakualaman	1113	79.87
Mergangsan	3542	72.50
Umbulharjo	7645	66.80
Kotagede	4224	80.68
<b>Kota Yogyakarta</b>	<b>44462</b>	<b>73.55</b>

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Yogyakarta dalam Kota Yogyakarta dalam angka 2017

Berdasarkan pada PUS peserta KB aktif persentasenya cukup tinggi di masing-masing kecamatan. Persentasenya pun melebihi 50% dari jumlah PUS di masing-masing Kecamatan. Kecamatan dengan persentase PUS peserta KB aktif tertinggi berada di Kecamatan Tegalrejo. Jumlah PUS yang mencapai 4.170 jiwa di Kecamatan Tegalrejo 84,20% dari PUS merupakan peserta KB aktif. tingkat partisipasi PUS dalam program KB yang tinggi disinyalir sebagai bentuk keberhasilan dari Program Kampung Berencana yang salah satunya ada di Kecamatan Tegalrejo. Kecamatan Tegalrejo dipilih karena kecamatan ini merupakan kawasan kumuh perkotaan (*slum area*). Pelaksanaan program Kampung Berencana ini dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan cara mengendalikan penduduk melalui program Keluarga Berencana.

Jumlah PUS peserta KB aktif yang tinggi di Kota Yogyakarta ternyata juga memiliki problem terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Hingga saat ini, Kota Yogyakarta masih memiliki PUS yang bukan atau tidak aktif KB namun ingin menunda atau tidak ingin memiliki anak kembali tanpa menggunakan alat kontrasepsi atau lebih dikenal sebagai kelompok *unmet need*. *Unmet need* sering di artikan sebagai kesenjangan antara keinginan PUS dengan penggunaan alat kontrasepsi. Menurut DHS (*Demographic Health Survey*) *unmet need* merupakan proporsi wanita usia subur yang menikah atau hidup bersama (seksual aktif) yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran berikutnya dalam jangka waktu minimal 2 tahun tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.

**Tabel 2. 7 *Unmet need* Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	2012	2013	2014	2015	2016
--------------	------	------	------	------	------



<b>Unmet Need</b>	12.09	10.67	9.25	10.38	11.4
-------------------	-------	-------	------	-------	------

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Yogyakarta, 2017

*Unmet need* Kota Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga 2016 tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB *unmet need* di Kota Yogyakarta sudah melebihi target nasional indikator tahun 2015 yang mencapai 5%. Penurunan persentase *unmet need* Kota Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga 2014 mulai mengalami penurunan. Namun pada tahun 2015 persentase *unmet need* Kota Yogyakarta mulai kembali meningkat dari 10,38% menjadi 11,40% di tahun 2016. Peningkatan ini perlu menjadi perhatian karena peningkatan persentase ini dapat berdampak pada meningkatnya kelahiran. Selain berdampak pada meningkatnya jumlah kelahiran, tingginya *unmet need* juga beresiko pada aborsi karena adanya unwanted pregnancy, jarak hamil terlalu dekat, melahirkan terlalu banyak maupun komplikasi penyakit selama kehamilan, kesulitan saat persalinan, dan komplikasi masa nifas (Listyaningsih, dkk, 2016).

Tingginya persentase *unmet need* yang ada di Kota Yogyakarta pada dasarnya tidak selalu berkaitan dengan angka kelahiran. Tingginya *unmet need* dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang meliputi karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses pelayanan. Secara umum, *unmet need* KB banyak terjadi pada perempuan yang menghadapi hambatan keuangan, pendidikan, geografis, dan sosial (Listyaningsih, dkk, 2016). Meskipun begitu wilayah lain dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memadai juga memiliki tingkat *unmet need* yang tinggi. Sebagai contoh yang terjadi pada Kota Yogyakarta yang memiliki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang baik. Faktor yang mempengaruhi *unmet need* di Kota Yogyakarta cenderung di sebabkan oleh faktor pendidikan. Menurut Sariyati, dkk (2015) semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar kejadian *unmet need*. Hal tersebut dikarenakan masyarakat semakin mengetahui tentang kontrasepsi sehingga keinginan semakin tinggi untuk tidak menggunakan kontrasepsi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan *unmet need* dapat dilakukan dengan edukasi



terhadap alat dan cara KB terhadap masyarakat dan memberikan kemudahan akses terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

## 2.5 Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0 - 1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

- a) Indeks Gini < 0,3 = ketimpangan rendah
- b)  $0,3 \leq$  Indeks Gini  $\leq 0,5$  = ketimpangan sedang (moderat)
- c) Indeks Gini > 0,5 = ketimpangan tinggi

Tabel 2. 8. Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Indeks Gini	0,3603	0,4366	0,3959	0,4431	NA	7,14
Kriteria Ketimpangan	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	NA	

Sumber: Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2014-2016)

Tabel diatas menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2012 - 2015. Berdasarkan nilai Indeks Gini, Kota Yogyakarta memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat) pada tahun 2012 - 2015. Indeks gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2012 - 2015 secara umum mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7, 14 persen per tahun.



Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkatnya Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa semakin terjadi ketimpangan pendapatan penduduk, dimana peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20 persen teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40 persen terbawah. Meskipun demikian, berdasarkan kategori ketimpangan pendapatannya, Kota Yogyakarta masih tergolong dalam kategori ketimpangan sedang (moderat).

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan berarti penduduk yang tidak miskin (penduduk sejahtera), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Yogyakarta yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2012, garis kemiskinan Kota Yogyakarta setara Rp. 333.232/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2013 setara Rp Rp 353.602/kapita/bulan, meningkat lagi menjadi Rp 366.520/kapita/bulan pada tahun 2014. Kota Yogyakarta memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan pada tingkat DIY. Selama rentang tahun 2012 - 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan 0,46 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin yang semakin menurun. Pada tahun 2012, penduduk



miskin sebesar 9,38 persen, terus berkurang menjadi 8,82 persen pada tahun 2013 dan 8,67 persen pada tahun 2014. Persentase jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2016 menjadi 7,70 persen, sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 8,61 persen. Pada tahun 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 92,30 persen. Tabel 4.26 menunjukkan data garis kemiskinan, penduduk miskin, dan penduduk di atas garis kemiskinan Kota Yogyakarta dibandingkan dengan tingkat DIY.

**Tabel 2.9. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016**

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kota Yogyakarta</b>						
Garis Kemiskinan	Rp/kapita/bulan	333.232	353.602	366.520	NA	401.193
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	37,40	35,60	36,60	35,26	32,06
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Persen	9,38	8,82	8,67	8,61	7,70
<b>Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan</b>	Persen	<b>90,62</b>	<b>91,18</b>	<b>91,33</b>	<b>91,39</b>	<b>92,30</b>
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>						
Garis Kemiskinan	Rp/kapita/bulan	270.110	303.843	321.056	347.721	360.169
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	565,7	541,9	532,59	485,56	488,83
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Persen	15,88	15,03	14,55	13,16	13,10
<b>Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan</b>	Persen	<b>84,12</b>	<b>84,97</b>	<b>85,45</b>	<b>86,84</b>	<b>86,90</b>

Sumber: 1. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2013, 2014 dan 2015

2. Kota Yogyakarta dalam Angka, 2013, 2014 dan 2015

3. Bappeda Kota Yogyakarta, 2017

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan pada tingkat DIY. Hal tersebut juga mengindikasikan persentase jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan DIY. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan DIY juga menunjukkan tren yang positif, berarti persentase penduduk miskin semakin menurun. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa program pemerintah untuk menanggulangi



kemiskinan di Kota Yogyakarta sudah banyak berhasil, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang kehendaki. Peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun terakhir juga menunjukkan fluktuasi, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta perlu dievaluasi dan dioptimalkan.

## **2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia ialah parameter yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender adalah parameter yang dapat digunakan untuk meninjau kualitas pemberdayaan lintas gender baik perempuan maupun laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan keadaan Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi berada di Kota Yogyakarta selama 4 tahun sejak tahun 2012 hingga 2016. Selama 4 tahun pula nilai IPM Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan mulai dari 83,29 pada tahun 2012 hingga 85,32 pada tahun 2016. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta terbilang bagus, pasalnya angka ini berada di atas rata-rata nilai Indeks Pembangunan Manusia nasional selama 4 tahun berjalan sejak 2012 hingga 2016.



**Tabel 2.10. Nilai Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai 2017**

Wilayah	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
D I Yogyakarta	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38	78.89
Kulon Progo	68.83	69.53	69.74	70.14	70.68	71.52	72.38	73.23
Bantul	75.31	75.79	76.13	76.78	77.11	77.99	78.42	78.67
Gunung Kidul	64.2	64.83	65.69	66.31	67.03	67.41	67.82	68.73
Sleman	79.69	80.04	80.1	80.26	80.73	81.2	82.15	82.85
Kota Yogyakarta	82.72	82.98	83.29	83.61	83.78	84.56	85.32	85.49

Sumber: Data Strategis DIY, 2017

Berdasarkan keadaan Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta apabila dibandingkan dengan kabupaten lain se-provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi diraih oleh Kota Yogyakarta selama 7 tahun sejak tahun 2010 hingga 2017. Selama 7 tahun pula nilai IPM Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan mulai dari 82,72 pada tahun 2010 hingga 85,49 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Yogyakarta, baik umur yang panjang, hidup sehat, pengetahuan dan hidup yang layak. IPM Kota Yogyakarta juga selalu lebih besar dibandingkan rata-rata IPM se-provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2.7 Pembangunan Keluarga

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Berakhirnya hubungan antara wanita dan pria dalam ikatan rumah tangga disebut dengan perceraian. Perceraian umumnya terjadi akibat kegagalan dalam menjalankan obligasi peran masing-masing baik suami sebagai kepala keluarga maupun istri sebagai pendamping suami. Perceraian kemudian ditandai dengan hidup yang terpisah dan secara resmi diakui oleh



hukum yang berlaku. Perceraian menandakan berhentinya kedua belah pihak baik suami maupun istri dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Yogyakarta, angka pernikahan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi sejak tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2015 total pernikahan di Kota Yogyakarta adalah 2247. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 2133 pernikahan. Pada tahun 2017, jumlah pernikahan di Kota Yogya mengalami peningkatan yang melebihi angka pernikahan di tahun 2015 yakni 2273 pernikahan. Adapun kecamatan yang memegang nilai tertinggi untuk pernikahan setiap tahunnya adalah Kecamatan Umbulharjo.

**Tabel 2.13 Jumlah Pernikahan dan Perceraian Kota Yogya tahun 2015-2017**

No	Kecamatan	2015		2016		2017	
		Nikah	Cerai	Nikah	Cerai	Nikah	Cerai
1	Mantrijeron	193	10	185	6	189	5
2	Kraton	150	4	149	1	180	4
3	Mergangsan	164	9	184	7	201	11
4	Umbulharjo	405	24	370	22	363	
5	Kotagede	167	16	150	15	149	9
6	Gondokusuman	246	15	234	11	275	
7	Danurejan	111	19	67	3	96	6
8	Pakualaman	54	3	64		71	2
9	Gondomanan	87	2	76		87	5
10	Ngampilan	88	5	104	7	91	3
11	Wirobrajan	148	9	141	10	129	
12	Gedongtengen	101	18	119	3	102	3
13	Jetis	124	19	128	12	130	10
14	Tegalrejo	209	31	162	11	210	13
	Total	2247	184	2133	108	2273	71

Sumber: Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 2018

Data pernikahan yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun berbeda dengan angka perceraian yang mengalami penurunan stabil sejak tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2015 angka perceraian di Kota Yogyakarta adalah 184 dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 108 perceraian. Angka ini kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 71 perceraian.

Meskipun mengalami penurunan, angka perceraian ini masih ada. Keharmonisan dalam keluarga perlu terus dijaga, peran antara suami dan istri



juga harus dilaksanakan dengan baik. Pendidikan agama menjadi sangat penting dalam membangun sebuah keluarga agar selalu harmonis.

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang telah diakui dan terdata dan atau tercatat dalam dokumen negara berarti telah sah secara hukum. Perkawinan yang sah menandakan pasangan suami dan istri yang terlibat telah saling memiliki hak dan kewajiban suami istri baik terhadap satu sama lain maupun terhadap negara. Hak yang didapatkan oleh pasangan atas perkawinan yang sah meliputi buku nikah dan sebuah keberhakan untuk menuntut pada pasangannya di mata pengadilan.

Berdasarkan data Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk sudah kawin di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sejumlah 207.189 jiwa. Kemudian mengalami penurunan ditahun 2015 sejumlah 189.305 jiwa. Tahun 2016 dan 2017 jumlah penduduk yang sudah kawin mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 dengan jumlah 190.258 jiwa dan 190.006 jiwa. Selama tahun 2014 – 2017, jumlah penduduk terbanyak yang sudah melakukan perkawinan berada di Kecamatan Umbulharjo. Sedangkan jumlah terendah berada di Kecamatan Gondomanan. Tinggi rendahnya jumlah penduduk kawin dapat dilihat dari komposisi penduduk dan jumlah penduduk di setiap kecamatan.

Menurut UU No 1 tahun 1974, perkawinan yang telah diakui dan terdata dan atau tercatat dalam dokumen negara berarti telah sah secara hukum. Jumlah kepemilikan akta nikah di Kota Yogyakarta menunjukkan kenaikan selama tahun 2014–tahun 2017. Tingginya kepemilikan akta nikah menunjukkan kesadaran penduduk untuk melakukan pencatatan nikah sudah cukup baik. Lonjakan jumlah kepemilikan dokumen terjadi pada tahun 2015, dari yang semula hanya 77.114 dokumen, di tahun 2015 menjadi 90.769 dokumen. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah kepemilikan dokumen naik secara signifikan dari 97.606 dokumen menjadi 102.578 dokumen. Kepemilikan akta nikah terbanyak adalah Kecamatan Umbulharjo. Banyaknya jumlah kepemilikan



dokumen akta nikah di Kecamatan Umbulharjo karena jumlah penduduk tertinggi berada di kecamatan ini. Sedangkan untuk jumlah terendah berada di Kecamatan Pakualaman. Rendahnya jumlah kepemilikan akta nikah ini dipengaruhi banyak faktor. Selain jumlah penduduk yang sedikit, kemungkinan melakukan pencatatan dokumen akta nikah dilakukan di luar wilayah domisili atau bisa melakukan pencatatan di wilayah domisili pasangan.

**Tabel 2. 12 Jumlah Kepemilikan Akta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2014 - 2017**

NO	KECAMATAN	2014 (dokumen)	2015 (dokumen)	2016 (dokumen)	2017 (dokumen)
1	Tegalrejo	7766	8633	9113	9583
2	Jetis	4457	5606	6226	6507
3	Gondokusuman	5034	6546	7344	7873
4	Danurejan	3423	4093	4407	4619
5	Gedongtengen	3308	3980	4226	4397
6	Ngampilan	2640	3237	3560	3770
7	Wirobrajan	5183	6158	6536	6790
8	Mantrijeron	6852	8028	8701	9144
9	Kraton	5134	5499	5804	6087
10	Gondomanan	2964	3428	3742	3909
11	Pakualaman	1719	2057	2207	2351
12	Mergangsan	5292	6470	7094	7603
13	Umbulharjo	17842	20213	21283	22140
14	Kotagede	5500	6821	7363	7805
<b>15</b>	<b>KOTA YOGYAKARTA</b>	<b>77114</b>	<b>90769</b>	<b>97606</b>	<b>102578</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Tahun 2018



### **BAB III**

## **PERAN PEMUKA AGAMA DALAM PROGRAM KKBPK**

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan salah satu program pokok pemerintah yang harus dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Suksesnya program tersebut tentunya harus membutuhkan pelibatan semua pihak yang ada di masyarakat, baik itu tokoh formal maupun tokoh non-formal, yang salah satunya adalah tokoh agama. Peran serta tokoh agama dalam program KKBPK adalah sebagai fasilitator dalam rangka mentransfer pengetahuan tentang KKBPK dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program KKBPK, sehingga partisipasi masyarakat dalam program tersebut dapat lebih ditingkatkan.

Peran serta tokoh agama dalam program KKBPK tidak bisa dilepaskan dari fungsi mereka sebagai seseorang yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat. Tokoh agama dinilai sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keilmuan yang mumpuni dalam bidang keagamaan, yang dengan keilmuan tersebut umumnya mereka dijadikan rujukan, panutan dan *role-model* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Besarnya pengaruh tokoh agama bisa dilihat dari segala keputusan baik itu permasalahan sosial, budaya, hukum, agama maupun politik yang ada di masyarakat akan meminta pendapatnya dan juga akan ditunggu anjuran para tokoh agama dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Tokoh agama merupakan sebuah figur yang dapat membimbing perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh umatnya yang taat. Tokoh agama memiliki



peran strategis sebagai agen perubahan sosial yang ada di masyarakat. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama sebagai agen perubahan yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan pembangunan karakter. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu (*problem solving*). Dan ketiga peran membangun sistem atau tradisi serta budaya yang mencerminkan kemuliaan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan pengaruh yang cukup kuat tersebut, maka pelibatan tokoh agama dalam mensukseskan program pembangunan dan kegiatan yang lain di masyarakat pastinya akan diikuti oleh masyarakat sekitar. besarnya pengaruh tokoh agama bisa dikapitalisasi dalam mengadvokasi dan KIE guna mensukseskan program KKBPK, yang pada gilirannya nanti diharapkan agar program KKBPK juga mendapatkan dukungan oleh masyarakat terutama umat beragama yang seiman dengan tokoh agama tersebut.

Beberapa peran tokoh agama dalam rangka mensukseskan program KKBPK diantaranya adalah menterjemahkan program KKBPK kedalam bahasa agama. Sehingga pemahaman masyarakat akan program KKBPK bisa sejalan dengan nilai dan norma yang ada dalam agama tersebut. Program KKBPK tidak semata hanya pada permasalahan alat kontrasepsi semata melainkan banyak sekali permasalahan yang terkait dengan kependudukan mulai dari permasalahan manusia itu lahir sampai dengan manusia itu meninggal.

Peran tokoh agama dalam program KKBPK (sesuai dengan kepanjangannya) bisa dilihat dalam tiga hal, yaitu masalah kependudukan, masalah keluarga berencana dan masalah pembangunan keluarga. Dalam masalah kependudukan, peran tokoh agama melalui mimbar keagamaan diharapkan mampu menyuarakan tentang bagaimana tingkat kesejahteraan penduduk dan kualitas penduduk yang bisa dikaitkan dengan permasalahan persebaran penduduk, struktur penduduk, mobilitas penduduk, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam hal keluarga berencana, peran tokoh agama diharapkan mampu menyuarakan tentang permasalahan pengendalian kependudukan melalui program Keluarga Berencana (KB) yang tujuannya adalah dalam rangka mengatur jarak ideal kelahiran dan jumlah anak ideal yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Peran tokoh agama diharapkan mampu membantu

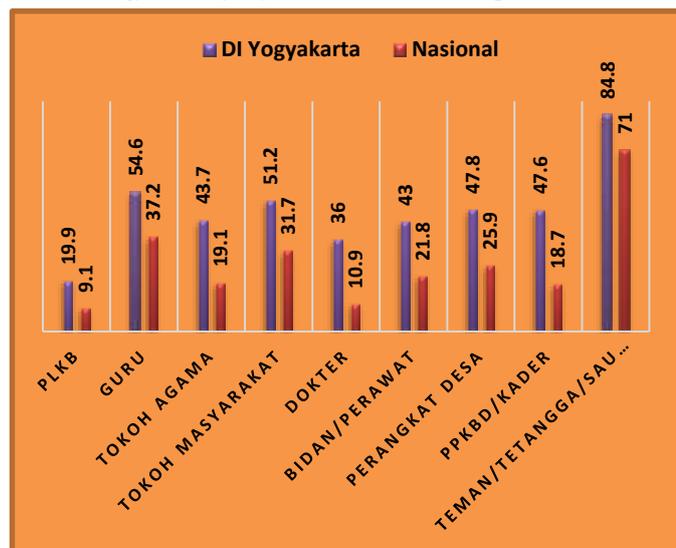


calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Dengan advokasi dan KIE yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut diharapkan pasangan suami istri mampu memikirkan bagaimana mengutamakan kualitas anak yang dimilikinya dibandingkan dari sisi jumlahnya.

Peran tokoh agama dalam permasalahan KB diharapkan juga menyasar pada generasi mudanya (tidak hanya yang sudah berkeluarga). Permasalahan mengenai usia ideal untuk perkawinan dan usia ideal untuk melahirkan juga harus disasar oleh para tokoh agama dalam materi keagamaan yang mereka sampaikan. Permasalahan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) juga harus menjadi perhatian serius para tokoh agama. Perilaku beresiko yang bisa mengganggu kesehatan mental dan fisik remaja saat ini sudah tahap memprihatinkan. Perilaku seks bebas remaja, narkoba, HIV/AIDS, dan kenakalan remaja lainnya sudah menjadi momok dalam mendidik anak-anak remaja. Untuk itu tokoh agama juga harus lebih intens lagi menyuarakan tentang KRR tersebut.

Peran tokoh agama yang ketiga dalam program KKBPK adalah menyuarakan tentang pembangunan keluarga. Peran tokoh agama dalam permasalahan ini pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Esensi keagamaan tentang bagaimana membangun keluarga yang sejahtera disemua agama selalu diajarkan. Memahami masyarakat akan kunci sukses membangun keluarga yang penuh akan cinta kasih dan sayang hampir terdengar setiap saat pada saat khutbah keagamaan. Namun, ada beberapa hal yang masih harus digaungkan oleh tokoh agama dalam permasalahan pembangunan keluarga. Yaitu, permasalahan kesejahteraan keluarga yang ditopang oleh ekonomi yang

Grafik 3.1 Sumber Informasi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Atas Permasalahan Kependudukan



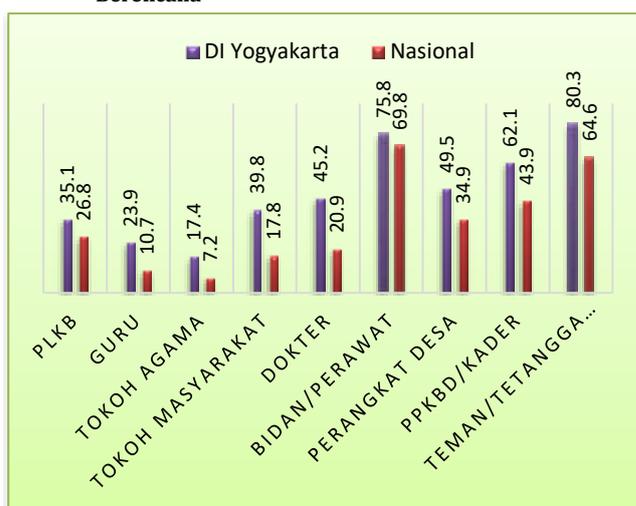
Sumber : SKAP 2018, Data Representasi Propinsi



stabil, kesehatan yang prima, dan pendidikan anak sampai tuntas juga harus juga menjadi prioritas utama. Karena isu-isu tersebut dinilai kurang disuarakan oleh tokoh agama.

Jika kita lihat dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh BKKBN melalui Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) 2018 (BKKBN, 2018). Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persentase keluarga di DIY<sup>1</sup> yang mengetahui tentang informasi kependudukan yang berasal dari tokoh agama dinilai cukup baik (Grafik 1) dibandingkan dengan persentase secara nasional. Bahkan jika kita bandingkan dengan persentase yang dilakukan oleh PLKB, Dokter dan bidan/perawat dalam pemberian informasi kependudukan, tokoh agama masih lebih baik dari mereka semua.

Grafik 3.2 Sumber Informasi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Atas Permasalahan Keluarga Berencana



Sumber : SKAP 2018, Data Representasi Propinsi

Peran tokoh agama di DIY dalam memberikan informasi mengenai KB dinilai masih sangat minim. Persentase masyarakat yang mengetahui tentang informasi KB yang berasal dari tokoh agama hanya 17.4 persen, masih kalah jauh dengan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa yang masing-masing persentasenya sebesar 39.8 persen dan 49.5 persen. Namun, jika kita bandingkan

dengan rata-rata peran tokoh agama secara nasional, maka tokoh agama di DIY masih jauh lebih baik (lihat grafik 2).

Sedangkan untuk peran tokoh agama dalam menyuarakan tentang KRR dinilai sudah cukup baik. Persentase masyarakat DIY yang mengetahui tentang informasi KRR yang bersumber dari tokoh agama sebesar 27.6 persen. persentase tersebut bahkan lebih baik dibandingkan dengan PLKB yang hanya 25.6 persen. Jika kita bandingkan dengan data nasional, maka peran tokoh agama di DIY dalam menyuarakan KRR masih jauh lebih baik,

<sup>1</sup> Data SKAP 2018 merupakan data yang merepresentasikan data propinsi, belum bisa dianalisis pada tingkat kabupaten/kota.

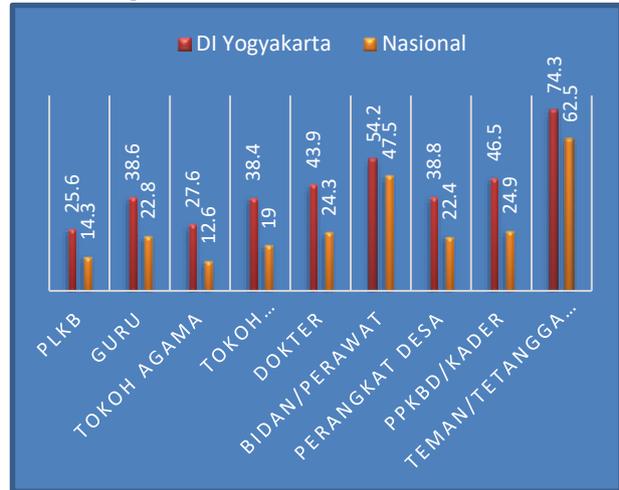


persentase rata-rata nasional hanya 12.6 persen (lihat grafik 3).

Peran tokoh agama dalam menyuarakan permasalahan KRR harus lebih digaungkan lagi. Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 memperlihatkan bahwa perilaku pacaran baik pria maupun wanita mengaku bahwa 30 % wanita dan 50 % pria pernah melakukan aktivitas cium bibir, 5 % wanita dan 22 % pria pernah melakukan aktivitas meraba atau diraba. Data ini cukup merisaukan jika kita lihat juga

dari pengalaman seksual pra nikah. 8 % pria dan 2 % wanita berdasarkan data tersebut menyatakan telah melakukan hubungan seksualitas dengan alasan 47 % karena saling mencintai, 30 % karena penasaran, 16 % terjadi begitu saja, dan 3 % karena dipaksa atau terpengaruh teman. Data tersebut jika kita bandingkan dengan hasil SDKI 2012 trend-nya justru mengalami peningkatan (SDKI, 2017).

Grafik 3.3 Sumber Informasi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Atas Permasalahan Kesehatan Reproduksi Remaja



Sumber : SKAP 2018, Data Representasi Propinsi

Grafik 3.4 Sumber Informasi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Atas Permasalahan Kesehatan Reproduksi Remaja



Sumber : SKAP 2018, Data Representasi Propinsi

Peran tokoh agama dalam menginformasikan kepada masyarakat di DIY dalam isu pembangunan keluarga/PK dinilai masih sangat kurang. Persentase masyarakat yang mengetahui akan peran tokoh agama dalam isu tersebut paling rendah (11.5 %) dibandingkan dengan petugas yang lain. Namun, jika kita bandingkan dengan persentase rata-rata secara nasional, peran



tokoh agama yang ada di DIY relative lebih baik (persentase nasional hanya 7.8 %).

Pentingnya peran tokoh agama dalam program KKBPK tidak hanya KIE semata. Melainkan juga diharapkan mampu memberikan masukan berupa pendapat, saran dan kritik guna perbaikan program KKBPK yang sudah dilakukan oleh instansi terkait. Tokoh agama sebagai seseorang yang selalu bersentuhan dengan ummatnya atau masyarakat pada umumnya pastinya memiliki kepekaan dan sensitifitas tentang apa saja yang terjadi pada masyarakat. Untuk itu masukan yang konstruktif akan selalu dibutuhkan oleh instansi terkait demi perbaikan dan suksesnya program KKBPK.



## BAB IV

# KIPRAH FAPSEDU KOTA YOGYAKARTA DALAM PROGRAM KKBPK

### 4.1 Visi, Misi, dan Tujuan Fapsedu Kota Yogyakarta

Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan atau disingkat dengan FAPSEDU merupakan sebuah wadah komunikasi lintas pemuka agama dan umat beragama dalam program pembinaan Kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK). Peran yang pada umumnya FAPSEDU jalankan adalah dengan melakukan advokasi dan KIE kepada masyarakat dalam rangka mensukseskan program KKBPK.

Kepengurusan Fapsedu di Kota Yogyakarta saat ini sudah memasuki periode kepengurusan yang kedua yaitu masa bhakti tahun 2017-2022. Visi besar yang diusung oleh Fapsedu Kota Yogyakarta adalah “terwujudnya masyarakat sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut”. Dari visi tersebut

Gambar 4.1 Suasana Pelantikan Pengurus Fapsedu Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2017-2022



Sumber : Dokumentasi Fapsedu Kota Yogyakarta



diturunkan dalam bentuk misi besar yaitu “meningkatkan kualitas insan Indonesia yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama dan meningkatkan kesadaran terhadap kependudukan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia”.

Secara organisatoris, tujuan dari Fapsedu kota Yogyakarta pada masa kepengurusan saat ini adalah untuk meningkatkan peran aktif pemuka lintas agama dalam program KKBPK. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan sumber dana dan tanggungjawab social korporasi untuk membangkitkan sumberdaya pelaksana program KKBPK. Dan yang terakhir adalah untuk membuka akses bagi pelayanan public dengan pendekatan konsep pencegahan, perawatan, kepedulian dan dukungan terhadap keluarga berdasarkan nilai ajaran agama yang dianut (DPPKB, 2017).

Dari beberapa tujuan tersebut, konsentrasi yang sudah dijalankan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta masih berkuat pada tujuan pertama dan yang terakhir. Sedangkan untuk tujuan yang ke-dua masih belum di sasar secara baik. Upaya peningkatan peran aktif pemuka agama dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran mereka akan program KKBPK perlu didorong biar lebih cepat lagi, mengingat masih minimnya para pemuka agama yang sadar akan pentingnya isu KKBPK.

Upaya dalam menumbuhkembangkan kesadaran para pemuka agama terhadap isu KKBPK bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada para pemuka agama melalui forum-forum yang ada di masing-masing kelompok keagamaan/organisasi keagamaan. Misalnya Fapsedu Kota Yogyakarta melakukan edukasi kepada para pemuka agama yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah, NU, KWI, KGI, dan lain sebagainya. Cara-cara seperti ini juga dimaksudkan dalam rangka menyaman persepsi/pemahaman/tafsir keagamaan atas permasalahan KKBPK.

Dengan terjalannya komunikasi antara Fapsedu Kota Yogyakarta dengan kelompok-kelompok keagamaan diharapkan nantinya terbangun sinergitas yang baik, yang pada gilirannya nanti akan adanya dukungan dari organisasi keagamaan tersebut untuk mendukung program KKBPK.



## **4.2 Sasaran Program Fapsedu Kota Yogyakarta**

Beberapa tugas yang sudah dijalankan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta adalah dengan memberikan penyuluhan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan bahasa agama terkait dengan masalah KKBPK. Program ini dijalankan melalui kegiatan sosialisasi kepada kelompok-kelompok keagamaan untuk mengajak mereka dalam memahami dan mengimplementasikan beberapa permasalahan yang ada dalam KKBPK. Selain itu juga melakukan pelayanan dan konseling mengenai program KKBPK. Program ini dijalankan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta, mengingat peran para pemuka agama yang tergabung dalam Fapsedu Kota Yogyakarta sudah memiliki bekal pengetahuan yang baik akan permasalahan KKBPK. Selain itu juga para pemuka agama juga menjadi orang yang sering dimintai pendapat dan saran atas berbagai permasalahan yang umat/masyarakat sekitar alami. Sehingga, jika permasalahan tersebut berkaitan dengan permasalahan KKBPK maka tokoh agama tersebut akan dengan mudah memberikan solusi atas permasalahan yang umat/masyarakat hadapi.

Tugas lain yang dijalankan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta adalah melakukan kerjasama yang efisien dan efektif dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan permasalahan KKBPK. Tugas ini pada dasarnya dalam rangka membangun jejaring antar semua elemen untuk mendukung program KKBPK. Kedekatan membangun jejaring berdasarkan isu yang diusung dinilai cukup efektif dalam menyuarakan program KKBPK, sehingga gaungnya dan isu yang diusung tersebut bisa disuarakan oleh banyak pihak.

Dari ketiga tugas tersebut maka sasaran program yang dijalankan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta adalah mengajak para pemuka agama untuk berperan aktif dalam hal terbinanya keluarga yang sejahtera, berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai agama yang dianutnya. Sasaran program ini menyentuh pondasi dasar yang harus dijalankan oleh masing-masing keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

Aspek keluarga yang sejahtera, harmonis, penuh kasih sayang merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka spirit dan nilai-nilai agama haruslah kuat dalam keluarga tersebut. Aspek inilah



yang menjadi titik strategis bagi Fapsedu Kota Yogyakarta untuk disentuh. Jika kita kaitkan dengan permasalahan yang sedang marak terjadi di Kota Yogyakarta yaitu maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh para remaja dengan aksi “klithih-nya” cukup memprihatinkan kita bersama. Dari hasil beberapa penelitian menyebutkan bahwa para remaja yang terlibat dalam kasus tersebut sebagian besar berasal dari keluarga yang bermasalah (broken home)(Darwin et al., 2017).

Sasaran program berikutnya yang dijalankan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta adalah bersama-sama dengan pemerintah, tokoh-tokoh agama, organisasi keagamaan, para pengusaha, dan lain-lain untuk bersinergi dalam upaya peningkatan ketahanan masyarakat dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang baik. Sasaran program ini dimaksudkan dalam rangka untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram, damai, penuh toleransi dan juga terciptanya keamanan dan ketertiban bersama.

Gambar 4.2 Susunan Pengurus Fapsedu Kota Yogyakarta

<b>Susunan Pengurus Fapsedu Kota Yogyakarta Periode 2017-2022</b>	
<b>Penasehat :</b>	
Walikota Yogyakarta	
<b>Dewan Pembina :</b>	
1.	Penasehat MUI Kota Yogyakarta
2.	Kepala Dinas PPKB Kota Yogyakarta
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
<b>Dewan Pelaksana :</b>	
Ketua	: Drs. Djufri Arsyad
Wakil Ketua	: St. Drs. P. Edward Lubis, MM., S.Pd.K.
Sekretaris	: Kabid Dalduk dan DAK (DPPKB)
Wakil Sekretaris	: Kasi Dalduk (DPPKB)
Bendahara	: Kabid KBPK (DPPKB)
Wakil Bendahara	: Kasi PK (DPPKB)
<b>Bagian Kemitraan :</b>	
Koordinator	: Kasi Data dan KIE (DPPKB)
Anggota	: 1. Dra. Liana Rosada 2. Joanes Suhari 3. Dameria Simanungkalit 4. Nyoman Trisnawati, S.Si. M,Si 5. Misdiantoro, S.Pd 6. Sihalifie, S.E
<b>Bagian Pemberdayaan :</b>	
Koordinator	: Kasi Keluarga Berencana (DPPKB)
Anggota	: 1. Dra. Hj. Masamah, M.Pd.I 2. Antonius Sunarto, S.Pd 3. Restiorina Sinamo, A. Md 4. Ida Made Panji, S.Ag 5. Meta Mahayati 6. Supriyadi

Sumber : DPPKB Kota Yogyakarta



Terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik tentunya akan berdampak pada individu-individu yang ada di dalamnya. Guna terciptanya tatanan social bermasyarakat yang baik, maka dibutuhkan sinergitas bersama dari semua pihak untuk mewujudkannya. Fapsedu tentunya bukanlah satu-satunya organisasi yang berkewajiban atas hal tersebut. Namun, pelibatan Fapsedu melalui peran tokoh-tokoh agama mutlak dibutuhkan dalam membantu mewujudkan tatanan social masyarakat yang baik tersebut.

Secara kelembagaan dan juga dalam rangka mempermudah pembagian peran yang akan dijalankan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta. Maka, pembagian kerja harus dilakukan. Devisi/bagian dalam organisasi Fapsedu terbagi dalam dua devisi. Yaitu devisi pemberdayaan dan devisi kemitraan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh devisi pemberdayaan adalah peningkatan pemahaman masyarakat dalam program KKBPK melalui kegiatan pelatihan, dialog, dan peningkatan pendapatan keluarga melalui pembentukan koperasi.

Rincian program yang harus dijalankan oleh devisi ini adalah :

1. Menyusun pandangan agama terhadap program KKBPK
2. Mengumpulkan informasi actual terkait dengan program KKBPK baik skala kota Yogyakarta maupun skala provinsi dan nasional (bank data).
3. Menginventarisir pemuka-pemuka agama yang bertugas melakukan penyuluhan program KKBPK.
4. Melakukan pelatihan bagi para pemuka agama untuk melakukan KIE (upaya peningkatan kapasitas pemuka agama dalam memahami program KKBPK)
5. Melakukan penyuluhan kepada kelompok masyarakat dalam bahasa agama.



Devisi yang ke-dua yang ada dalam struktur Fapsedu Kota Yogyakarta adalah devisi kemitraan. Tujuan dari devisi ini adalah untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan Fapsedu. Dari tujuan tersebut, maka rincian tugas yang harus dijalankan oleh devisi ini adalah :

Gambar 4.3 Suasana Sosialisasi Pengendalian Penduduk dan Generasi Berencana Bagi Remaja di Kota Yogyakarta



Sumber : Dokumentasi Fapsedu Kota Yogyakarta

1. Menginventarisir secara internal lembaga-lembaga keagamaan yang potensial untuk penyuluhan program KKBPK.
2. Menginventarisir secara eksternal lembaga dan instansi yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan Fapsedu Kota Yogyakarta.
3. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan lembaga/instansi tersebut untuk diisi penyuluhan tentang program KKBPK.
4. Melakukan pelatihan kepada pimpinan lembaga-lembaga keagamaan tentang KIE program KKBPK.
5. Melakukan penyuluhan bagi generasi muda di kelompok keagamaan tentang program KKBPK.



### 4.3 Capaian Kinerja Fapsedu Kota Yogyakarta

Secara capaian, Fapsedu Kota Yogyakarta merupakan Fapsedu yang paling aktif di wilayah DIY. Hal ini bisa dilihat dari sudah terbentuknya kepengurusan Fapsedu sampai dengan level kecamatan (14 kecamatan). Dari kesemua kecamatan tersebut, secara kepengurusan dan program kerja dimasing-masing kecamatan sudah terbentuk. Beberapa kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta diantaranya adalah pendampingan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Unmetneed bagi enam kelompok agama, peningkatan kapasitas perwakilan anggota

Gambar 4.4 Suasana Pertemuan Antara Fapsedu Kota Yogyakarta dengan Fapsedu Seluruh Kecamatan



Sumber : Dokumentasi Fapsedu Kota Yogyakarta

Fapsedu di 14 kecamatan, sosialisasi pengendalian penduduk bagi PUS lintas agama, dan sosialisasi pengendalian penduduk bagi remaja lintas agama.

Kegiatan yang dilakukan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta nantinya sangat terbantu oleh Fapsedu yang ada di masing-masing kecamatan. karena dengan terbentuknya Fapsedu di masing-masing kecamatan maka secara kerja kewilayahan akan lebih kecil dan juga akan lebih focus pada apa yang dibutuhkan di masing-masing kecamatan tersebut. Adapun program kerja dan kegiatan yang sudah dirumuskan dan dijalankan oleh masing-masing Fapsedu kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

#### 1) **Kecamatan Gondomanan :**

- Mengadakan pertemuan berkolaborasi dengan Kelompok KB Pria.
- Menggerakkan masyarakat dengan sasaran umat beragama untuk dapat menjadi peserta KB dan dibawa ketempat pelayanan KB.



**2) Kecamatan Jetis :**

- Mengadakan pertemuan berkolaborasi dengan Kelompok KB Pria.
- Melakukan KIE ke wilayah berbasis RW/lingkungan.
- Menggerakkan masyarakat menjadi peserta KB, PUP bagi generasi muda serta mengatur jarak kelahiran.

**3) Kecamatan Pakualaman :**

- Sosialisasi keberadaan Fapsedu di 2 kelurahan yaitu Kel. Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti.
- Melakukan KIE ke wilayah berbasis RW/lingkungan.
- Memberikan Informasi ke masyarakat apabila ada kegiatan Pelayanan KB Gratis

**4) Kecamatan Gedongtengen :**

- Mengadakan pertemuan berkolaborasi dengan Kelompok KB Pria.
- Sosialisasi Fapsedu di tiap – tiap pertemuan yang ada di wilayah.

**5) Kecamatan Kraton :**

- Untuk Administrasi : Pembuatan buku Daftar Anggota, Daftar hadir dan Buku Notulen Kegiatan.
- Untuk Kegiatan : Mengadakan penyuluhan kepada PUS Unmeet need lintas agama.
- Melaksanakan KIE seperti mengajak PUS untuk pasang KB.

**6) Kecamatan Wirobrajan :**

- Meningkatkan kelembagaan atau kepengurusan di tingkat kecamatan.
- Mengadakan kegiatan yang mengarah ke remaja (baik PIK R ataupun Karang Taruna tentang Bahaya Pernikahan Usia Dini).

Gambar 4.5 Suasana Pelantikan Kepengurusan Fapsedu Kecamatan Tegalrejo



Sumber : Dokumentasi Fapsedu Kota Yogyakarta



**7) Kecamatan Mergangsan:**

- Penyuluhan kesehatan tentang masalah KB dan TBC dengan Narasumber dari Kepala Puskesmas Kec. Mergangsan bagi Anggota Fapsedu dan tokoh masyarakat.
- Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Ketahanan Keluarga dan Generasi pelanjut dengan Narasumber dari Kepala BNN Kota Yogyakarta.

**8) Kecamatan Umbulharjo :**

- Memberikan Informasi ke masyarakat apabila ada kegiatan Pelayanan KB Gratis.
- Penyuluhan tentang Bahaya Pernikahan dini dari KUA Kec. Umbulharjo.
- Membukukan secara tertib untuk kepengurusan serta pertemuan rutin.

**9) Kecamatan Gondokusuman :**

- Sosialisasi FAPSEDU di tiap - tiap pertemuan pertemuan yang ada diwilayah.
- Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi Kontrasepsi Pria dari Perwakilan BKKBN DIY.
- Dari Pengurus Fapsedu khususnya Agama Islam akan menyisipkan dalam tausiahnya tentang Ketahanan Keluarga.

**10) Kecamatan Danurejan :**

- Membahas kepengurusan Fapsedu Danurejan.
- Membuat Seragam untuk Anggota Fapsedu Kecamatan Danurejan.
- Melaksanakan KIE seperti mengajak PUS untuk pasang KB

**11) Kecamatan Kotagede :**

- Mendata PUS yang belum ber KB bekerjasama dengan PKB Kecamatan yang kemudian akan bersama sama melakukan KIE kepada keluarga tersebut.
- Akan bersinergi dengan semua sektor terutama kader IMP diwilayah untuk menginventarisir permasalahan terkait masalah agama yang bertentangan dengan Program KB.
- Kunjungan rumah pada warga yang sulit/menolak KB.

**12) Kecamatan Mantrijeron :**

- Melakukan KIE tentang KKBPk ke wilayah.



- Meningkatkan kepedulian Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam program Fapsedu untuk dapat peduli masalah kependudukan dan kesejahteraan.
- Sosialisasi kepada Remaja agar terwujud Generasi yang berkualitas.

**13) Kecamatan Tegalrejo:**

- Pemantapan Pengurus Fapsedu.
- Melakukan KIE tentang KKBPk ke wilayah.
- Mengevaluasi kinerja di bulan bulan sebelumnya

**14) Kecamatan Ngampilan :**

- Melakukan Sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan melalui pembinaan pranikah yang dilakukan bersamaan dengan penasehatan di BP 4 di KUA.
- Melakukan KIE tentang KKBPk ke wilayah.

Dari kesemua program kegiatan yang akan dan sudah dilakukan oleh masing-masing Fapsedu baik itu Fapsedu Kota maupun kecamatan akan didanai oleh APBD Kota Yogyakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta (DPPKB).

#### **4.4 Aspek Kelembagaan Dan Pola Koordinasi Fapsedu Kota Yogyakarta**

Secara kelembagaan, apa yang dilakukan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta pada dasarnya perlu diapresiasi. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mensukseskan program KKBPk yang ada di Kota Yogyakarta. Beberapa terobosan yang sudah dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pembuatan leaflet dengan tujuan untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang kiprah dan program kerja yang mereka lakukan. Selain itu, mereka juga melakukan sosialisasi kegiatan melalui media social melalui Facebook dan Instagram.

Dalam melakukan koordinasi baik secara internal di Fapsedu Kota dan koordinasi dengan Fapsedu yang ada di masing-masing kecamatan, mereka menggunakan media social melalui group whatsapp untuk mempermudah



jalur koordinasi. Selain itu juga mekanisme pertemuan yang regular tetap mereka lakukan. Pertemuan semua pengurus baik itu Fapsedu kota maupun kecamatan dalam kurun waktu satu tahun diadakan pertemuan sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Maret, Juni, dan September. Tujuan dari pertemuan regular tersebut adalah dalam rangka melakukan koordinasi kegiatan, evaluasi kegiatan dan pemantapan program.

Dari sisi kelembagaan, kewenangan antara Fapsedu Kota dengan kecamatan pastinya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut didasarkan pada cakupan wilayah kegiatan dan juga pada hierarki kelembagaan. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Fapsedu Kota Yogyakarta adalah :

1. Membentuk Fapsedu Kecamatan
2. Melantik Fapsedu Kecamatan
3. Memberikan KIE akseptor kecamatan tentang kontrasepsi mantap
4. Memberikan penyuluhan ke kecamatan
5. Memantau pelaksanaan Fapsedu kecamatan
6. Penyuluhan tentang KB

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Fapsedu kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pertemuan pengurus Fapsedu kecamatan
2. Merencanakan program kerja
3. Menjalin kemitraan tingkat kecamatan dalam dalam program KKBPK
4. Menyelenggarakan KIE kepada PUS tentang program KKBPK di wilayahnya

Dalam menjalankan tugas untuk mensukseskan program KKBPK, pengurus Fapsedu yang ada di masing-masing kecamatan bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah dibawahnya. Pelibatan pemerintah yang ada dibawah kecamatan seperti kelurahan dan RW perlu dilakukan agar tingkat keberhasilan program KKBPK bisa lebih optimal lagi. Pentingnya pelibatan



tersebut dikarenakan para pemuka agama pada level bawah juga sangat banyak.

Para pemuka agama pada level kampung justru memiliki peran yang strategis dimasyarakat, karena merekalah yang langsung bersentuhan terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. selain itu juga, para pemuka agama pada level kampung memiliki kedekatan secara emosional dengan masyarakat sekitar, sehingga apa yang disampaikan oleh para pemuka agama tersebut akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan para pemuka agama yang tidak dikenal oleh masyarakat sekitar.



## **BAB V**

### **OPTIMALISASI PERAN FAPSEDU KOTA YOGYAKARTA DALAM PROGRAM KKBPK**

Kiprah Fapsedu Kota Yogyakarta dalam program KKBPK dinilai sudah cukup baik. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan untuk melakukan advokasi dan KIE di masyarakat. Bahkan secara kepengurusan, Fapsedu Kota Yogyakarta sudah terbentuk sampai dengan kepengurusan di level kecamatan. Keberhasilan Fapsedu Kota Yogyakarta dalam mensukseskan program KKBPK harusnya tidak berhenti disini saja. Untuk itu beberapa terobosan yang perlu dilakukan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta perlu dilakukan.

Terobosan kegiatan Fapsedu Kota Yogyakarta yang perlu dilakukan adalah pelibatan semua lapisan pada kelompok keagamaan mulai dari anak-anak, remaja, bahkan pada level orang tua yang ada di komunitas keagamaan sudah harus mulai disasar oleh mereka. Kelompok-kelompok belajar keagamaan anak-anak seperti TPA, kolompok belajar sebaya di komunitas Kristen, dan kelompok agama lainnya bisa dijadikan lahan kegiatan baru bagi Fapsedu. Karena dengan semakin dini anak-anak mendapatkan pengetahuan akan program KKBPK maka akan semakin tertanam pemahaman mereka akan pentingnya KKBPK dimasa yang akan datang.

Materi tentang KKBPK pada dasarnya masuk pada semua lapisan masyarakat. Karena bahasan yang diajarkan dalam KKBPK tidak semata pada persolan KB semata. Kasus-kasus terkait dengan dengan ketahanan keluarga yang diukur dari indikator delapan fungsi keluarga juga bisa mulai ditanamkan kepada



generasi muda sejak awal. Untuk itu keberadaan kepengurusan Fapsedu sampai dengan kecamatan harusnya bisa juga diarahkan untuk menysasar mereka.

Sosialisasi KKBPK juga harus menysasar pada pasangan yang akan melakukan pernikahan. Kerjasama dengan kantor kementerian agama melalui Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) perlu digiatkan lagi. Karena badan tersebut merupakan sebuah organisasi yang berupaya untuk meningkatkan kualitas perkawinan (khususnya pada umat Islam) untuk melakukan pembinaan, membimbing, dan mengayomi keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu juga kegiatan yang serupa di kelompok-kelompok agama yang lain juga harus dilakukan.

Pemanfatan media teknologi dan informasi juga bisa dilakukan sebagai sarana dalam melakukan KIE di masyarakat. Pada era digital saat ini fasilitas tersebut dirasa cukup efektif dalam mengkampanyekan program KKBPK. Penggunaan aplikasi yang syarat akan konten KKBPK perlu difikirkan sebagai sarana alternatif baru dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya program KKBPK. Fapsedu bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan memasukkan materi-materi KKBPK dalam bahasa keagamaan.

Terkait dengan materi keagamaan yang dikaitkan dengan program KKBPK. Fapsedu harusnya sudah mulai menyusun buku panduan yang disesuaikan dengan masing-masing kelompok keagamaan. Buku panduan tersebut pada dasarnya harus dikeluarkan oleh organisasi yang otoritatif dalam memaknai dan manafsirkan pokok-pokok ajaran agama yang bisa dimasuki oleh materi KKBPK. Pentingnya buku panduan tersebut dimaksudkan agar tidak adanya perbedaan paham dan pengetahuan akan program KKBPK.

Pelibatan semua unsur di masing-masing kelompok kegamaan juga harus bisa diakomodir dalam Fapsedu. Mengingat banyaknya organisasi kelompok keagamaan yang ada di masing-masing agama sangat beragam. Sehingga dengan pelibatan banyak organisasi keagamaan diharapkan umat yang berafiliasi dalam organisasi keagamaan juga teredukasi akan pentingnya program KKBPK.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peran tokoh agama dalam rangka mensukseskan program KKBPK sangatlah penting. Tokoh agama sebagai seseorang yang memiliki pengaruh cukup kuat di masyarakat diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas melalui program KKBPK.

Beberapa program kegiatan yang sudah dilakukan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta diantaranya adalah pendampingan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Unmetneed bagi enam kelompok agama, peningkatan kapasitas perwakilan anggota Fapsedu di-14 kecamatan, sosialisasi pengendalian penduduk bagi PUS lintas agama, dan sosialisasi pengendalian penduduk bagi remaja lintas agama.

Program kegiatan yang sudah dilakukan tersebut harusnya bisa dimaksimalkan lagi karena kepengurusan Fapsedu sudah terbentuk sampai dengan level kecamatan. Untuk itu pembagian kerja secara kewilayahan akan lebih memudahkan mereka dalam mengkampanyekan program KKBPK. Fapsedu Kota Yogyakarta juga melakukan terobosan dengan cara melakukan pembuatan leaflet dengan tujuan untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang kiprah dan program kerja yang mereka lakukan. Selain itu, mereka juga melakukan sosialisasi kegiatan melalui media social melalui Facebook dan Instagram.



## **6.2 Rekomendasi**

Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka menjalankan fungsi KIE, Fapsedu Kota Yogyakarta membutuhkan sebuah buku panduan yang yang dikeluarkan oleh masing-masing kelompok keagamaan yang otoritatif dalam menterjemahkan program KKBPK kedalam bahasa agama. Sehingga dengan buku panduan tersebut akan tercipta kesepahaman akan dan pengetahuan yang utuh mengenai KKBPK.
- 2) Fapsedu Kota Yogyakarta harus mampu melibatkan semua unsur kelompok keagamaan. Fapsedu Kota Yogyakarta harus bisa mengajak semua organisasi keagamaan yang ada di Kota Yogyakarta untuk terlibat dalam mengkampanyekan program KKBPK sehingga program ini bisa lebih massif lagi diketahui oleh masyarakat banyak.
- 3) Secara aspek keuangan, Fapsedu sudah saatnya mampu mencari sumber-sumber anggaran yang baru sehingga dalam melaksanakan programnya tidak tergantung pada anggaran pemerintah Kota Yogyakarta.
- 4) Sasaran program yang dilakukan oleh Fapsedu Kota Yogyakarta harus mulai menyasar kelompok anak-anak dan remaja agar pemahaman anak-anak dan remaja akan pentingnya program KKBPK bisa diketahui sejak dini.



## DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2018). *Hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Tahun 2018 [Modul Keluarga] Sasaran Renstra BKKBN 2018*.
- Darwin, Muhadjir; Ekawati, Henny; Habib, F. (2017). Membangun Relasi Digital Antara Orang Tua Siswa Dengan Sekolah Dalam Penanganan Tawuran Pelajar Di Yogyakarta. *Jurnal Populasi*, 25(2), 1-23.
- DPPKB. (2017). Brosur FAPSEDU. *DPPKB Kota Yogyakarta*.
- SDKI. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 : Buku Remaja*.